



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUHARTONO**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN**
3. NHK : **735937**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **3.500.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 419 m²/419 m² di KAB / KOTA BLITAR, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m²/142 m² di KAB / KOTA BLITAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/120 m² di KAB / KOTA BLITAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **456.500.000**

1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU F7OR-R TAFT Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.5 G AT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
4. MOTOR, YAMAHA RX K Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
5. MOTOR, HONDA CBR 150 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 18.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **37.975.000**

D. SURAT BERTAHAGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **1.816.250.807**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **5.810.725.807**



III. HUTANG

Rp. 450.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.360.725.807

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.